



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
10. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

14. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah diluar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
17. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
20. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH/WKDH adalah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah.
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
22. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
23. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
24. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
25. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp23.766.948.041.000,00 (dua puluh tiga triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat puluh satu ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah Rp23.352.448.041.000,00
- b. Belanja Daerah Rp23.766.948.041.000,00
Defisit (Rp414.500.000.000,00)
- c. Pembiayaan Daerah
 - 1. Penerimaan Rp484.500.000.000,00
 - 2. Pengeluaran Rp70.000.000.000,00
 - Pembiayaan Netto Rp414.500.000.000,00
 - SiLPA Tahun Rp0,00
 - Berkekaan

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp23.352.448.041.000,00 (dua puluh tiga triliun tiga ratus lima puluh dua miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp15.929.432.150.000,00 (lima belas triliun sembilan ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah yang direncanakan sebesar Rp12.503.441.258.000,00 (dua belas triliun lima ratus tiga miliar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Retribusi yang direncanakan sebesar Rp2.406.226.823.000,00 (dua triliun empat ratus enam miliar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp707.736.377.000,00 (tujuh ratus tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta

tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); dan

- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp312.027.692.000,00 (tiga ratus dua belas miliar dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.503.441.258.000,00 (dua belas triliun lima ratus tiga miliar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. PKB yang direncanakan sebesar Rp4.585.967.192.000,00 (empat triliun lima ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah); dan
 - b. seterusnya sesuai level objek pada Pajak Daerah.
- (2) Anggaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.406.226.823.000,00 (dua triliun empat ratus enam miliar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum yang direncanakan sebesar Rp2.297.304.164.000,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus empat juta seratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - b. seterusnya sesuai level objek pada Retribusi Daerah.
- (3) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp707.736.377.000,00 (tujuh ratus tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah/dividen atas penyertaan modal pada BUMN yang direncanakan sebesar Rp1.710.538.000,00 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah); dan
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah/dividen atas penyertaan modal pada BUMD yang direncanakan sebesar Rp706.025.839.000,00 (tujuh ratus enam miliar dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp312.027.692.000,00 (tiga ratus dua belas miliar dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan yang direncanakan sebesar Rp565.500.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); dan

- b. seterusnya sesuai level objek pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pasal 7

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp7.397.415.721.000,00 (tujuh triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.
- (2) Anggaran Pendapatan Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.397.415.721.000,00 (tujuh triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah). yang terdiri atas:
 - a. Dana bagi hasil yang direncanakan sebesar Rp428.888.889.000,00 (empat ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - b. seterusnya sesuai level objek pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp25.600.170.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), yaitu Pendapatan Hibah.
- (2) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp25.600.170.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), yaitu Pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri.

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp23.766.948.041.000,00 (dua puluh tiga triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp15.571.460.039.336,00 (lima belas triliun lima ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus enam puluh tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;

- b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.528.775.845.000,00 (tujuh triliun lima ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.978.582.099.336,00 (lima triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.647.280.000,00 (tujuh miliar enam ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.046.047.815.000,00 (dua triliun empat puluh enam miliar empat puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
 - (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.407.000.000,00 (sepuluh miliar empat ratus tujuh juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang direncanakan sebesar Rp7.528.775.845.000,00 (tujuh triliun lima ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN; dan
 - b. seterusnya sesuai level objek pada Belanja Pegawai.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.800.704.904.000,00 ((tiga triliun delapan ratus miliar tujuh ratus empat juta sembilan ratus empat ribu rupiah).
- (3) seterusnya sesuai level objek pada Belanja Pegawai.

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) yang direncanakan sebesar Rp5.978.582.099.336,00 (lima triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Barang; dan
 - b. seterusnya sesuai level objek pada Belanja Barang dan Jasa.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp894.208.627.324,00

(delapan ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

- (3) seterusnya sesuai level objek pada Belanja Barang dan Jasa.

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) direncanakan sebesar Rp7.647.280.000,00 (tujuh miliar enam ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Subsidi kepada BUMN; dan
 - b. seterusnya sesuai level objek pada Belanja Subsidi.
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.252.280.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) seterusnya sesuai level objek pada Belanja Subsidi.

Pasal 14

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) yang direncanakan sebesar Rp2.046.047.815.000,00 (dua triliun empat puluh enam miliar empat puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat; dan
 - b. seterusnya sesuai level objek pada Belanja Hibah.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp193.893.600.000,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) dan seterusnya sesuai level objek pada Belanja Hibah.

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) direncanakan sebesar Rp10.407.000.000,00 (sepuluh miliar empat ratus tujuh juta rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
 - b. seterusnya sesuai level objek pada Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) seterusnya sesuai level objek pada Belanja Bantuan Sosial.

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp1.699.107.432.664,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh sembilan miliar seratus tujuh juta empat ratus tiga

puluh dua ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.355.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah).
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp900.251.060.664,00 (sembilan ratus miliar dua ratus lima puluh satu juta enam puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp423.210.653.000,00 (empat ratus dua puluh tiga miliar dua ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp251.015.926.000,00 (dua ratus lima puluh satu miliar lima belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp118.736.293.000,00 (seratus delapan belas miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
 - (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.538.500.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) direncanakan sebesar Rp3.355.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), yaitu: Belanja Modal Tanah BLUD.
- (2) Belanja Modal Tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.355.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) direncanakan sebesar Rp900.251.060.664,00 (sembilan ratus miliar dua ratus lima puluh satu juta enam puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. dan seterusnya sesuai level objek pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a besar direncanakan sebesar Rp1.381.412.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua belas ribu rupiah).

- (3) seterusnya sesuai level objek pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) direncanakan sebesar Rp423.210.653.000,00 (empat ratus dua puluh tiga miliar dua ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. seterusnya sesuai level objek pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp108.926.022.000,00 (seratus delapan miliar sembilan ratus dua puluh enam juta dua puluh dua ribu rupiah).
- (3) seterusnya sesuai level objek pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) direncanakan sebesar Rp251.015.926.000,00 (dua ratus lima puluh satu miliar lima belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan; dan
 - b. seterusnya sesuai level objek pada Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp182.372.299.000,00 (seratus delapan puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) seterusnya sesuai level objek pada Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi.

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) direncanakan sebesar Rp118.736.293.000,00 (seratus delapan belas miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan; dan
 - b. seterusnya sesuai level objek pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp504.524.000,00 (lima ratus empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (3) seterusnya sesuai level objek pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) direncanakan sebesar Rp2.538.500.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud; dan
 - b. seterusnya sesuai level objek pada Belanja Modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.300.500.000,00 (satu miliar tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud.
- (3) seterusnya sesuai level objek pada Belanja Modal Aset Lainnya.

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp6.476.380.569.000,00 (enam triliun empat ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.043.881.549.000,00 (empat triliun empat puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp Rp2.432.499.020.000,00 (dua triliun empat ratus tiga puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) direncanakan sebesar Rp4.043.881.549.000,00 (empat triliun empat puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota dan Desa direncanakan sebesar

Rp4.043.881.549.000,00 (empat triliun empat puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) direncanakan sebesar Rp2.432.499.020.000,00 (dua triliun empat ratus tiga puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota; dan
 - b. seterusnya sesuai level objek pada Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah ke Kabupaten/Kota di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp470.588.120.000,00 (empat ratus tujuh puluh miliar lima ratus delapan puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) seterusnya sesuai level objek pada Belanja Bantuan Keuangan.

Pasal 27

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp414.500.000.000,00 (empat ratus empat belas miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 28

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp 484.500.000.000,00 (empat ratus delapan puluh empat miliar lima ratus juta rupiah), yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp484.500.000.000,00 (empat ratus delapan puluh empat miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penghematan Belanja.
 - b. seterusnya sesuai level objek pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (4) seterusnya sesuai level objek pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Pasal 29

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah), yaitu

Penyertaan Modal Daerah.

- (2) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) yaitu untuk Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

Pasal 30

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp414.500.000.000,00 (empat ratus empat belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp414.500.000.000,00 (empat ratus empat belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 32

Ketentuan mengenai penjabaran APBD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. Lampiran I : berisi ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Dan Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : berisi penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III A : berisi Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
- d. Lampiran III B : berisi Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
- e. Lampiran IV A : berisi Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- f. Lampiran IV B : berisi Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- g. Lampiran V A : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;

- h. Lampiran V B : berisi Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- i. Lampiran VI A : berisi Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten;
- j. Lampiran VI B : berisi Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kota;
- k. Lampiran VI C : berisi daftar Nama penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pemerintah Desa;
- l. Lampiran VII : berisi rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- m. Lampiran VIII : berisi rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam atau Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- n. Lampiran IX : berisi rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- o. Lampiran X : berisi sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi pada Daerah Perbatasan dalam Perda tentang APBD dan Perkada Tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
- p. Lampiran XI : berisi rekapitulasi dan Sinkronisasi Perkada Penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana; dan
- q. Lampiran XII : berisi formulir Komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan Barang dan Jasa serta Belanja Modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN),

Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN).

Pasal 33

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
197007291996031001



LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR
JAWA TENGAH
NOMOR : 36 Tahun 2025
TANGGAL : 30 Desember 2025

PROVINSI JAWA TENGAH
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI
MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	23.352.448.041.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.929.432.150.000
4.1.1	Pajak Daerah	12.503.441.258.000
4.1.1.1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4.585.967.192.000
4.1.1.1.1	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	96.922.410.000
4.1.1.1.1.1	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	96.048.000.000
4.1.1.1.1.2	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	179.566.000
4.1.1.1.1.4	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	694.844.000
4.1.1.1.2	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	232.041.221.000
4.1.1.1.2.1	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	230.879.585.000
4.1.1.1.2.4	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	1.161.636.000
4.1.1.1.3	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	1.850.298.624.000
4.1.1.1.3.1	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	1.835.143.747.000
4.1.1.1.3.2	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	1.605.310.000
4.1.1.1.3.4	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	13.549.567.000
4.1.1.1.4	PKB-Mobil Bus-Microbus	32.499.267.000
4.1.1.1.4.1	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	27.840.909.000
4.1.1.1.4.2	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	3.393.924.000
4.1.1.1.4.4	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	1.264.434.000
4.1.1.1.5	PKB-Mobil Bus-Bus	10.031.888.000
4.1.1.1.5.1	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	1.443.576.000
4.1.1.1.5.2	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	8.475.931.000
4.1.1.1.5.4	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	112.381.000
4.1.1.1.6	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	281.941.619.000
4.1.1.1.6.1	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	279.012.099.000
4.1.1.1.6.2	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	942.096.000
4.1.1.1.6.4	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	1.987.424.000
4.1.1.1.7	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	281.573.965.000
4.1.1.1.7.1	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	257.558.548.000
4.1.1.1.7.2	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	21.676.676.000
4.1.1.1.7.4	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	2.338.741.000
4.1.1.1.8	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	71.392.051.000
4.1.1.1.8.1	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	38.229.093.000
4.1.1.1.8.2	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	32.365.861.000
4.1.1.1.8.4	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	797.097.000
4.1.1.1.9	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	12.166.929.000
4.1.1.1.9.1	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	12.093.395.000
4.1.1.1.9.2	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum	13.708.000
4.1.1.1.9.4	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	59.826.000
4.1.1.1.10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	1.712.773.610.000
4.1.1.1.10.1	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	1.709.225.396.000
4.1.1.1.10.4	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	3.548.214.000
4.1.1.1.11	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	4.325.608.000
4.1.1.1.11.1	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	4.080.631.000
4.1.1.1.11.4	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	244.977.000
4.1.1.2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2.131.133.896.000

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.1.2.1	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	12.087.749.000
4.1.1.2.1.1	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	12.087.749.000
4.1.1.2.2	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	84.949.211.000
4.1.1.2.2.1	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	84.949.211.000
4.1.1.2.3	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	627.328.517.000
4.1.1.2.3.1	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	627.328.517.000
4.1.1.2.4	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	26.219.905.000
4.1.1.2.4.1	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	26.219.905.000
4.1.1.2.5	BBNKB-Mobil Bus-Bus	10.358.558.000
4.1.1.2.5.1	BBNKB-Mobil Bus-Bus	10.358.558.000
4.1.1.2.6	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	101.506.857.000
4.1.1.2.6.1	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	101.506.857.000
4.1.1.2.7	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	62.411.063.000
4.1.1.2.7.1	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	62.411.063.000
4.1.1.2.8	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	29.622.494.000
4.1.1.2.8.1	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	29.622.494.000
4.1.1.2.9	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	6.697.082.000
4.1.1.2.9.1	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	6.697.082.000
4.1.1.2.10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	1.163.210.519.000
4.1.1.2.10.1	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	1.163.210.519.000
4.1.1.2.11	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	6.741.941.000
4.1.1.2.11.1	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	6.741.941.000
4.1.1.3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	2.786.771.413.000
4.1.1.3.1	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	1.997.516.413.000
4.1.1.3.1.1	PBBKB Bahan Bakar Bensin	1.997.516.413.000
4.1.1.3.2	PBBKB-Bahan Bakar Solar	789.230.000.000
4.1.1.3.2.1	PBBKB Bahan Bakar Solar	789.230.000.000
4.1.1.3.3	PBBKB-Bahan Bakar Gas	25.000.000
4.1.1.3.3.1	PBBKB Bahan Bakar Gas	25.000.000
4.1.1.4	Pajak Air Permukaan	19.845.000.000
4.1.1.4.1	Pajak Air Permukaan	19.845.000.000
4.1.1.4.1.1	Pajak Air Permukaan	19.845.000.000
4.1.1.5	Pajak Rokok	2.957.468.412.000
4.1.1.5.1	Pajak Rokok	2.957.468.412.000
4.1.1.5.1.1	Pajak Rokok	2.957.468.412.000
4.1.1.17	Pajak Alat Berat	35.345.000
4.1.1.17.1	Pajak Alat Berat	35.345.000
4.1.1.17.1.1	Pajak Alat Berat	35.345.000
4.1.1.18	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	22.220.000.000
4.1.1.18.1	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	22.220.000.000
4.1.1.18.1.1	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	22.220.000.000
4.1.2	Retribusi Daerah	2.406.226.823.000
4.1.2.1	Retribusi Jasa Umum	2.297.304.164.000
4.1.2.1.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.297.304.164.000
4.1.2.1.1.4	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan	23.892.500.000
4.1.2.1.1.5	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	2.273.411.664.000
4.1.2.2	Retribusi Jasa Usaha	105.881.859.000
4.1.2.2.6	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	10.850.925.000
4.1.2.2.6.1	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	10.850.925.000
4.1.2.2.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	10.460.514.400
4.1.2.2.12.1	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	10.460.514.400
4.1.2.2.13	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	26.775.000
4.1.2.2.13.1	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	26.775.000

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.2.2.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	4.977.104.000
4.1.2.2.14.1	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	4.977.104.000
4.1.2.2.16	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	10.947.500.000
4.1.2.2.16.1	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	10.947.500.000
4.1.2.2.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	5.857.927.000
4.1.2.2.17.1	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	5.857.927.000
4.1.2.2.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	20.647.518.024
4.1.2.2.19.1	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	20.647.518.024
4.1.2.2.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	42.113.595.576
4.1.2.2.20.1	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	42.113.595.576
4.1.2.3	Retribusi Perizinan Tertentu	3.040.800.000
4.1.2.3.8	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	3.040.800.000
4.1.2.3.8.1	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	3.040.800.000
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	707.736.377.000
4.1.3.1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	1.710.538.000
4.1.3.1.1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	1.710.538.000
4.1.3.1.1.1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	1.710.538.000
4.1.3.2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	706.025.839.000
4.1.3.2.1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	655.105.537.000
4.1.3.2.1.1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	655.105.537.000
4.1.3.2.2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	37.704.556.000
4.1.3.2.2.1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	37.704.556.000
4.1.3.2.3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	13.215.746.000
4.1.3.2.3.1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	13.215.746.000
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	312.027.692.000
4.1.4.1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	565.500.000
4.1.4.1.2	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	565.500.000
4.1.4.1.2.55	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	565.500.000
4.1.4.3	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.003.926.000
4.1.4.3.2	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	2.003.926.000
4.1.4.3.2.1	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	2.003.926.000
4.1.4.5	Jasa Giro	20.000.000.000
4.1.4.5.2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	20.000.000.000
4.1.4.5.2.1	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	20.000.000.000
4.1.4.7	Pendapatan Bunga	45.000.000.000
4.1.4.7.1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	45.000.000.000
4.1.4.7.1.1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	45.000.000.000
4.1.4.9	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	53.567.434.000
4.1.4.9.1	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	53.567.434.000
4.1.4.9.1.1	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	53.567.434.000
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	30.875.332.000
4.1.4.16.2	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	22.625.332.000
4.1.4.16.2.1	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	22.625.332.000
4.1.4.16.6	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	8.250.000.000
4.1.4.16.6.1	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	750.000.000
4.1.4.16.6.2	Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga	7.500.000.000
4.1.4.23	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	15.500.000
4.1.4.23.1	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	15.500.000

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.4.23.1.1	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	15.500.000
4.1.4.27	Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah	160.000.000.000
4.1.4.27.1	Pendapatan Denda Pajak Daerah	160.000.000.000
4.1.4.27.1.1	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan	160.000.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	7.397.415.721.000
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.397.415.721.000
4.2.1.6	Insentif Fiskal	-
4.2.1.6.2	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-
4.2.1.6.2.1	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-
4.2.1.6.3	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	-
4.2.1.6.3.1	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	-
4.2.1.7	Dana Bagi Hasil (DBH)	428.888.889.000
4.2.1.7.1	DBH Pajak	424.048.637.000
4.2.1.7.1.1	DBH PBB	14.629.102.000
4.2.1.7.1.2	DBH PPh Pasal 21	205.453.952.000
4.2.1.7.1.3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	-
4.2.1.7.1.4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	203.965.583.000
4.2.1.7.2	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	4.840.252.000
4.2.1.7.2.1	DBH SDA Minyak Bumi	875.765.000
4.2.1.7.2.2	DBH SDA Gas Bumi	-
4.2.1.7.2.3	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	97.301.000
4.2.1.7.2.4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	35.490.000
4.2.1.7.2.5	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	-
4.2.1.7.2.6	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	3.831.696.000
4.2.1.7.2.7	DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	-
4.2.1.7.2.8	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-
4.2.1.7.2.9	DBH SDA Perikanan	-
4.2.1.8	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.315.379.169.000
4.2.1.8.1	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	3.221.471.619.000
4.2.1.8.1.1	DAU	3.221.471.619.000
4.2.1.8.2	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	93.907.550.000
4.2.1.8.2.4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	43.948.075.000
4.2.1.8.2.5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	49.959.475.000
4.2.1.9	Dana Alokasi Khusus (DAK)	3.653.147.663.000
4.2.1.9.2	DAK Non Fisik	3.653.147.663.000
4.2.1.9.2.1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	2.152.073.350.000
4.2.1.9.2.2	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	42.000.000
4.2.1.9.2.3	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	19.329.000.000
4.2.1.9.2.9	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.500.000.000
4.2.1.9.2.10	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	3.000.000.000
4.2.1.9.2.32	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi	22.226.241.000
4.2.1.9.2.36	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	1.453.709.072.000
4.2.1.9.2.37	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	360.000.000
4.2.1.9.2.39	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	408.000.000
4.2.1.9.2.41	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	500.000.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	25.600.170.000
4.3.1	Pendapatan Hibah	25.600.170.000
4.3.1.4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	25.600.170.000
4.3.1.4.1	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	25.600.170.000
4.3.1.4.1.1	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	25.600.170.000
	Jumlah Pendapatan	23.352.448.041.000
5	BELANJA DAERAH	23.766.948.041.000
5.1	BELANJA OPERASI	15.571.460.039.336
5.1.1	Belanja Pegawai	7.528.775.845.000
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.800.704.904.000
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	2.761.463.696.000

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok PNS	1.908.213.401.000
5.1.1.1.1.2	Belanja Gaji Pokok PPPK	853.250.295.000
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	263.028.702.000
5.1.1.1.2.1	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	178.127.246.000
5.1.1.1.2.2	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	84.901.456.000
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	15.569.235.000
5.1.1.1.3.1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	15.569.235.000
5.1.1.1.3.2	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	-
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	156.862.716.000
5.1.1.1.4.1	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	149.486.060.000
5.1.1.1.4.2	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7.376.656.000
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	99.085.232.000
5.1.1.1.5.1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	19.116.320.000
5.1.1.1.5.2	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	79.968.912.000
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	154.118.077.000
5.1.1.1.6.1	Belanja Tunjangan Beras PNS	94.389.763.000
5.1.1.1.6.2	Belanja Tunjangan Beras PPPK	59.728.314.000
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	51.320.005.000
5.1.1.1.7.1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	50.858.853.000
5.1.1.1.7.2	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	461.152.000
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	471.802.000
5.1.1.1.8.1	Belanja Pembulatan Gaji PNS	447.390.000
5.1.1.1.8.2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	24.412.000
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	248.400.038.000
5.1.1.1.9.1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	200.715.935.000
5.1.1.1.9.2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	47.684.103.000
5.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.596.458.000
5.1.1.1.10.1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.328.426.000
5.1.1.1.10.2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	4.268.032.000
5.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	20.987.786.000
5.1.1.1.11.1	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	13.675.868.000
5.1.1.1.11.2	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	7.311.918.000
5.1.1.1.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	20.801.157.000
5.1.1.1.12.1	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	14.605.517.000
5.1.1.1.12.2	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	6.195.640.000
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.406.943.889.000
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.914.006.942.000
5.1.1.2.1.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.569.501.063.000
5.1.1.2.1.2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	344.505.879.000
5.1.1.2.2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	838.900.000
5.1.1.2.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	601.900.000
5.1.1.2.2.2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	237.000.000
5.1.1.2.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	15.488.864.000
5.1.1.2.3.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	15.488.864.000
5.1.1.2.6	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.476.609.183.000
5.1.1.2.6.1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor	22.540.111.000
5.1.1.2.6.64	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	1.038.695.160.000
5.1.1.2.6.66	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	300.000.000
5.1.1.2.6.70	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	415.013.912.000
5.1.1.2.6.72	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	60.000.000
5.1.1.4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	147.436.623.000
5.1.1.4.1	Belanja Uang Representasi DPRD	3.798.900.000
5.1.1.4.1.1	Belanja Uang Representasi DPRD	3.798.900.000
5.1.1.4.2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	531.846.000
5.1.1.4.2.1	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	531.846.000
5.1.1.4.3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	460.800.000

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.1.4.3.1	Belanja Tunjangan Beras DPRD	460.800.000
5.1.1.4.4	Belanja Uang Paket DPRD	325.620.000
5.1.1.4.4.1	Belanja Uang Paket DPRD	325.620.000
5.1.1.4.5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	5.515.736.000
5.1.1.4.5.1	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	5.515.736.000
5.1.1.4.6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	387.600.000
5.1.1.4.6.1	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	387.600.000
5.1.1.4.7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	233.352.000
5.1.1.4.7.1	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	233.352.000
5.1.1.4.8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	30.240.000.000
5.1.1.4.8.1	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	30.240.000.000
5.1.1.4.9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	7.560.000.000
5.1.1.4.9.1	Belanja Tunjangan Reses DPRD	7.560.000.000
5.1.1.4.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	16.591.924.000
5.1.1.4.10.1	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	16.591.924.000
5.1.1.4.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	147.000
5.1.1.4.11.1	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	147.000
5.1.1.4.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	59.394.698.000
5.1.1.4.12.1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	418.698.000
5.1.1.4.12.2	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	20.000.000
5.1.1.4.12.3	Belanja Jaminan Kematian DPRD	30.000.000
5.1.1.4.12.4	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	58.926.000.000
5.1.1.4.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	22.356.000.000
5.1.1.4.13.1	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	22.356.000.000
5.1.1.4.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	40.000.000
5.1.1.4.14.1	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	40.000.000
5.1.1.5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.743.094.000
5.1.1.5.1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000
5.1.1.5.1.1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000
5.1.1.5.2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.744.000
5.1.1.5.2.1	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.744.000
5.1.1.5.3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000
5.1.1.5.3.1	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000
5.1.1.5.4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.084.000
5.1.1.5.4.1	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.084.000
5.1.1.5.5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	6.000.000
5.1.1.5.5.1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	6.000.000
5.1.1.5.6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000
5.1.1.5.6.1	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000
5.1.1.5.7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.857.000
5.1.1.5.7.1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.857.000
5.1.1.5.8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	182.000
5.1.1.5.8.1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	182.000
5.1.1.5.9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	545.000
5.1.1.5.9.1	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	545.000
5.1.1.5.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	2.500.000.000
5.1.1.5.10.1	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH	2.500.000.000
5.1.1.5.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	-
5.1.1.5.11.18	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	-
5.1.1.6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	24.570.948.000
5.1.1.6.1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	676.800.000
5.1.1.6.1.1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	676.800.000
5.1.1.6.2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	23.894.148.000
5.1.1.6.2.1	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	23.894.148.000
5.1.1.99	Belanja Pegawai BLUD	146.376.387.000
5.1.1.99.99	Belanja Pegawai BLUD	146.376.387.000

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.1.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	146.376.387.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.978.582.099.336
5.1.2.1	Belanja Barang	894.208.627.324
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	863.092.292.624
5.1.2.1.1.1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.530.966.000
5.1.2.1.1.2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	10.598.323.000
5.1.2.1.1.4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	17.478.119.000
5.1.2.1.1.5	Belanja Bahan-Bahan Baku	616.817.000
5.1.2.1.1.8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.793.215.500
5.1.2.1.1.9	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	435.923.000
5.1.2.1.1.10	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	3.473.519.000
5.1.2.1.1.11	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	4.427.191.000
5.1.2.1.1.12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	26.895.104.060
5.1.2.1.1.13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.761.908.100
5.1.2.1.1.16	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	164.026.500
5.1.2.1.1.18	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	16.223.000
5.1.2.1.1.20	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	15.000.000
5.1.2.1.1.23	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	301.910.000
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	23.773.876.740
5.1.2.1.1.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	156.050.700
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	38.843.330.700
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.011.807.400
5.1.2.1.1.28	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	600.000
5.1.2.1.1.29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	541.913.900
5.1.2.1.1.30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.814.792.234
5.1.2.1.1.31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.665.856.100
5.1.2.1.1.32	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.026.940.800
5.1.2.1.1.34	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	611.315.000
5.1.2.1.1.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.335.858.000
5.1.2.1.1.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	39.091.300.240
5.1.2.1.1.37	Belanja Obat-Obatan-Obat	30.059.173.000
5.1.2.1.1.38	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.253.326.000
5.1.2.1.1.39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	303.309.628.300
5.1.2.1.1.40	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	38.391.308.000
5.1.2.1.1.41	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	1.958.608.000
5.1.2.1.1.43	Belanja Natura dan Pakan-Natura	41.770.572.000
5.1.2.1.1.44	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	100.061.000
5.1.2.1.1.45	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	39.718.743.000
5.1.2.1.1.49	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	-
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	47.244.494.550
5.1.2.1.1.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.639.076.000
5.1.2.1.1.55	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	40.714.779.000
5.1.2.1.1.56	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	400.968.000
5.1.2.1.1.57	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	108.150.000
5.1.2.1.1.58	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	89.869.020.000
5.1.2.1.1.61	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	13.795.410.000
5.1.2.1.1.62	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	84.100.000
5.1.2.1.1.63	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.702.560.000
5.1.2.1.1.64	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.637.194.800
5.1.2.1.1.65	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	331.500.000
5.1.2.1.1.66	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	19.900.000
5.1.2.1.1.67	Belanja Pakaian Penyelamatan	4.900.000
5.1.2.1.1.68	Belanja Pakaian Siaga	46.875.000
5.1.2.1.1.70	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	40.000.000
5.1.2.1.1.71	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	61.734.000

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.2.1.1.74	Belanja Pakaian Adat Daerah	317.000.000
5.1.2.1.1.75	Belanja Pakaian Batik Tradisional	335.600.000
5.1.2.1.1.76	Belanja Pakaian Olahraga	1.697.080.000
5.1.2.1.1.77	Belanja Pakaian Paskibraka	98.645.000
5.1.2.1.2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	3.450.000
5.1.2.1.2.3	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	3.450.000
5.1.2.1.4	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	31.112.884.700
5.1.2.1.4.10	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	695.600.000
5.1.2.1.4.22	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	2.500.000
5.1.2.1.4.23	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	10.000.000
5.1.2.1.4.25	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	41.880.000
5.1.2.1.4.35	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.490.952.000
5.1.2.1.4.36	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.377.321.000
5.1.2.1.4.37	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	10.000.000
5.1.2.1.4.38	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	8.000.000
5.1.2.1.4.39	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	6.000.000
5.1.2.1.4.40	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	15.503.000
5.1.2.1.4.43	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	123.462.000
5.1.2.1.4.49	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	4.000.000
5.1.2.1.4.62	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	123.689.000
5.1.2.1.4.81	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	10.000.000
5.1.2.1.4.102	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	500.000
5.1.2.1.4.104	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	242.575.000
5.1.2.1.4.105	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen	-
5.1.2.1.4.109	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen	-
5.1.2.1.4.111	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	175.622.000
5.1.2.1.4.114	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1.837.000
5.1.2.1.4.115	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	3.300.000
5.1.2.1.4.117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.467.114.000
5.1.2.1.4.118	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	4.389.312.000
5.1.2.1.4.120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	475.953.700
5.1.2.1.4.121	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.370.023.000
5.1.2.1.4.122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	222.341.000
5.1.2.1.4.123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	802.359.000
5.1.2.1.4.124	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	149.310.000
5.1.2.1.4.125	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	30.000.000
5.1.2.1.4.127	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	-
5.1.2.1.4.131	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	22.000.000
5.1.2.1.4.137	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	25.000.000
5.1.2.1.4.146	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	37.000.000

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.2.1.4.202	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	200.000
5.1.2.1.4.204	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	1.836.639.000
5.1.2.1.4.205	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	3.850.000
5.1.2.1.4.210	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	2.651.186.000
5.1.2.1.4.214	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik	54.998.000
5.1.2.1.4.218	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	1.500.000.000
5.1.2.1.4.231	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi	2.060.634.000
5.1.2.1.4.237	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	15.000.000
5.1.2.1.4.250	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	13.133.000
5.1.2.1.4.255	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan	3.798.000
5.1.2.1.4.318	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	120.000.000
5.1.2.1.4.321	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan	595.860.000
5.1.2.1.4.405	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	298.029.000
5.1.2.1.4.406	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	342.535.000
5.1.2.1.4.408	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	12.000.000
5.1.2.1.4.409	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	72.700.000
5.1.2.1.4.411	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	231.161.000
5.1.2.1.4.463	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	140.000.000
5.1.2.1.4.464	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan	163.500.000
5.1.2.1.4.505	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	2.162.000
5.1.2.1.4.509	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	56.700.000
5.1.2.1.4.510	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	953.975.000
5.1.2.1.4.515	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	43.350.000
5.1.2.1.4.518	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	34.200.000
5.1.2.1.4.519	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	-
5.1.2.1.4.522	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	-
5.1.2.1.4.539	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	20.000.000
5.1.2.1.4.545	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	44.300.000
5.1.2.1.4.569	Belanja Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	36.980.000
5.1.2.1.4.652	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	45.000.000
5.1.2.1.4.656	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	15.000.000
5.1.2.1.4.690	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya	2.100.000
5.1.2.1.4.699	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	75.000.000
5.1.2.1.4.704	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	2.000.000
5.1.2.1.4.708	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM	6.006.000
5.1.2.1.4.710	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	12.500.000

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.2.1.4.712	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama	3.750.000
5.1.2.1.4.716	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	1.200.000
5.1.2.1.4.742	Belanja Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	292.285.000
5.1.2.1.4.754	Belanja Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak-Ternak Lainnya	18.000.000
5.1.2.2	Belanja Jasa	1.983.577.513.012
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	1.353.833.142.606
5.1.2.2.1.1	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	8.400.000
5.1.2.2.1.2	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	46.800.000
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	85.561.817.400
5.1.2.2.1.4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.429.000.000
5.1.2.2.1.5	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	1.110.000.000
5.1.2.2.1.6	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	8.313.177.000
5.1.2.2.1.7	Honorarium Rohaniwan	4.800.000
5.1.2.2.1.9	Honorarium Penyelenggara Ujian	33.660.000
5.1.2.2.1.11	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	3.062.900.000
5.1.2.2.1.12	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	6.002.000.000
5.1.2.2.1.13	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	70.584.898.000
5.1.2.2.1.14	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	5.610.814.000
5.1.2.2.1.15	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	535.539.000
5.1.2.2.1.16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	9.311.980.000
5.1.2.2.1.17	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	887.250.000
5.1.2.2.1.20	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	7.518.700.000
5.1.2.2.1.21	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	22.769.485.000
5.1.2.2.1.22	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	7.833.612.000
5.1.2.2.1.23	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	8.355.370.000
5.1.2.2.1.24	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	29.190.000
5.1.2.2.1.25	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	3.767.235.000
5.1.2.2.1.26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.488.607.800
5.1.2.2.1.28	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.373.828.108
5.1.2.2.1.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	13.994.583.980
5.1.2.2.1.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	155.997.253.400
5.1.2.2.1.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	128.346.380.576
5.1.2.2.1.33	Belanja Jasa Tenaga Supir	3.521.245.400
5.1.2.2.1.34	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	1.840.625.000
5.1.2.2.1.35	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	119.105.800
5.1.2.2.1.36	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	2.535.713.592
5.1.2.2.1.37	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	4.242.250.000
5.1.2.2.1.38	Belanja Jasa Tata Rias	3.200.000
5.1.2.2.1.39	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.083.304.072
5.1.2.2.1.41	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	177.726.000
5.1.2.2.1.42	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.351.600.000
5.1.2.2.1.43	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	103.500.000
5.1.2.2.1.45	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	428.884.000
5.1.2.2.1.46	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1.324.431.500
5.1.2.2.1.47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	29.533.797.490
5.1.2.2.1.48	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	297.000.000
5.1.2.2.1.49	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	1.191.071.200
5.1.2.2.1.50	Belanja Jasa Kalibrasi	792.691.000
5.1.2.2.1.51	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.712.407.036
5.1.2.2.1.52	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	513.434.000
5.1.2.2.1.53	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	944.356.000
5.1.2.2.1.54	Belanja Jasa Jalan/Tol	151.834.000
5.1.2.2.1.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	66.783.028.000
5.1.2.2.1.57	Belanja Jasa Operator Kapal	23.000.000

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.2.2.1.59	Belanja Tagihan Telepon	5.589.996.366
5.1.2.2.1.60	Belanja Tagihan Air	6.454.489.200
5.1.2.2.1.61	Belanja Tagihan Listrik	64.967.848.934
5.1.2.2.1.62	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	482.761.000
5.1.2.2.1.63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	32.231.497.700
5.1.2.2.1.64	Belanja Paket/Pengiriman	8.893.753.000
5.1.2.2.1.66	Belanja Registrasi/Keanggotaan	62.820.000
5.1.2.2.1.67	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.602.404.644
5.1.2.2.1.69	Belanja Pengolahan Air Limbah	28.000.000
5.1.2.2.1.70	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	200.000
5.1.2.2.1.73	Belanja Medical Check Up	626.121.000
5.1.2.2.1.74	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	225.000.000
5.1.2.2.1.76	Belanja Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan	1.500.000
5.1.2.2.1.77	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	17.000.000
5.1.2.2.1.78	Belanja Sewa Jasa Internet	206.003.000
5.1.2.2.1.79	Belanja Jasa Pengujian Sampel Pangan	222.335.000
5.1.2.2.1.80	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	23.774.095.000
5.1.2.2.1.81	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.327.890.000
5.1.2.2.1.82	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	78.000.000
5.1.2.2.1.83	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan guru	95.762.232.000
5.1.2.2.1.84	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kependidikan	-
5.1.2.2.1.85	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan	187.200.000
5.1.2.2.1.86	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis	4.910.604.408
5.1.2.2.1.87	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	5.791.552.000
5.1.2.2.1.88	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	193.004.864.400
5.1.2.2.1.89	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional	34.983.134.000
5.1.2.2.1.90	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	167.750.355.600
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	373.317.740.356
5.1.2.2.2.2	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	327.725.597.000
5.1.2.2.2.4	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	4.989.600.000
5.1.2.2.2.5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.307.267.720
5.1.2.2.2.6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	155.857.540
5.1.2.2.2.7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	172.473.020
5.1.2.2.2.8	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	9.050.891.200
5.1.2.2.2.9	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	41.900.000
5.1.2.2.2.12	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	3.693.592.000
5.1.2.2.2.13	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	1.686.672.000
5.1.2.2.2.14	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Guru	3.830.529.000
5.1.2.2.2.16	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan	7.488.000
5.1.2.2.2.17	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis	189.329.800
5.1.2.2.2.18	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	103.758.400
5.1.2.2.2.19	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	7.212.401.688
5.1.2.2.2.20	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional	1.310.790.360
5.1.2.2.2.21	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	6.749.026.960
5.1.2.2.2.22	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Guru	229.894.000
5.1.2.2.2.24	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan	449.280

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.2.2.2.25	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis	7.450.636
5.1.2.2.2.26	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	6.309.728
5.1.2.2.2.27	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	434.391.296
5.1.2.2.2.28	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional	103.545.268
5.1.2.2.2.29	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	405.052.160
5.1.2.2.2.30	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Guru	693.721.000
5.1.2.2.2.32	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan	561.600
5.1.2.2.2.33	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis	9.501.764
5.1.2.2.2.34	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	34.280.660
5.1.2.2.2.35	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	1.166.511.520
5.1.2.2.2.36	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional	182.674.208
5.1.2.2.2.37	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional	816.222.548
5.1.2.2.3	Belanja Sewa Tanah	1.140.178.000
5.1.2.2.3.1	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	100.000.000
5.1.2.2.3.4	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	365.678.000
5.1.2.2.3.5	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	270.500.000
5.1.2.2.3.14	Belanja Sewa Tanah Pertanian	50.000.000
5.1.2.2.3.17	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	5.250.000
5.1.2.2.3.35	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	348.750.000
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	141.982.368.800
5.1.2.2.4.3	Belanja Sewa Excavator	258.000.000
5.1.2.2.4.12	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	67.896.000
5.1.2.2.4.22	Belanja Sewa Electric Generating Set	121.210.000
5.1.2.2.4.31	Belanja Sewa Peralatan Selam	1.600.000
5.1.2.2.4.34	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	87.100.000
5.1.2.2.4.35	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.769.300.000
5.1.2.2.4.36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.363.963.000
5.1.2.2.4.37	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	442.920.000
5.1.2.2.4.40	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	73.150.000
5.1.2.2.4.43	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	97.699.078.000
5.1.2.2.4.49	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	33.200.000
5.1.2.2.4.52	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	7.100.000
5.1.2.2.4.73	Belanja Sewa Perkakas Standard (Standard Tools)	55.000.800
5.1.2.2.4.102	Belanja Sewa Alat Ukur Lainnya	18.000.000
5.1.2.2.4.115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	47.000.000
5.1.2.2.4.116	Belanja Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5.500.000
5.1.2.2.4.117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.110.445.000
5.1.2.2.4.118	Belanja Sewa Mebel	13.213.785.000
5.1.2.2.4.120	Belanja Sewa Alat Pembersih	106.440.000
5.1.2.2.4.121	Belanja Sewa Alat Pendingin	53.400.000
5.1.2.2.4.123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	108.491.000
5.1.2.2.4.128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	10.000.000
5.1.2.2.4.129	Belanja Sewa Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	40.000
5.1.2.2.4.132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	11.386.989.000
5.1.2.2.4.133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	35.000.000
5.1.2.2.4.135	Belanja Sewa Peralatan Cetak	111.996.000
5.1.2.2.4.140	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio HF/FM	6.200.000
5.1.2.2.4.248	Belanja Sewa Alat Laboratorium Umum	13.350.000
5.1.2.2.4.355	Belanja Sewa Peralatan Umum	2.110.965.000

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.2.2.4.404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	1.490.000.000
5.1.2.2.4.409	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	32.550.000
5.1.2.2.4.412	Belanja Sewa Optik	6.183.800.000
5.1.2.2.4.416	Belanja Sewa Elektronik/Electric	1.758.200.000
5.1.2.2.4.425	Belanja Sewa Peralatan Bantu	22.000.000
5.1.2.2.4.438	Belanja Sewa Elektrik	7.000.000
5.1.2.2.4.453	Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian	2.500.000
5.1.2.2.4.463	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	5.000.000
5.1.2.2.4.506	Belanja Sewa Peralatan Senam	25.000.000
5.1.2.2.4.509	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	139.200.000
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	18.312.262.500
5.1.2.2.5.1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	882.899.500
5.1.2.2.5.9	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	12.777.186.000
5.1.2.2.5.10	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.000.000
5.1.2.2.5.11	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	448.500.000
5.1.2.2.5.13	Belanja Sewa Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	9.524.000
5.1.2.2.5.18	Belanja Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	340.545.000
5.1.2.2.5.25	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	1.526.503.000
5.1.2.2.5.33	Belanja Sewa Bangunan Parkir	80.000.000
5.1.2.2.5.36	Belanja Sewa Taman	62.300.000
5.1.2.2.5.42	Belanja Sewa Asrama	376.110.000
5.1.2.2.5.43	Belanja Sewa Hotel	1.494.865.000
5.1.2.2.5.50	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	310.830.000
5.1.2.2.6	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.130.000
5.1.2.2.6.126	Belanja Sewa Jaringan Listrik Lainnya	-
5.1.2.2.6.130	Belanja Sewa Jaringan dengan Media Udara	4.130.000
5.1.2.2.7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	1.969.505.000
5.1.2.2.7.13	Belanja Sewa Audio Visual	99.400.000
5.1.2.2.7.20	Belanja Sewa Karya Musik	32.000.000
5.1.2.2.7.28	Belanja Sewa Alat Musik	344.000.000
5.1.2.2.7.31	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	54.125.000
5.1.2.2.7.57	Belanja Sewa Tanaman	1.439.980.000
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	14.697.505.600
5.1.2.2.8.1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	748.231.000
5.1.2.2.8.2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	7.000.000
5.1.2.2.8.3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	9.158.000
5.1.2.2.8.6	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	90.000.000
5.1.2.2.8.8	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	5.424.324.000
5.1.2.2.8.9	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	2.158.698.000
5.1.2.2.8.12	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	425.011.600
5.1.2.2.8.13	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	340.711.000
5.1.2.2.8.16	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	67.000.000
5.1.2.2.8.17	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	381.160.000
5.1.2.2.8.18	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	15.700.000
5.1.2.2.8.19	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.219.716.000
5.1.2.2.8.20	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	196.974.000
5.1.2.2.8.21	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	2.951.368.000
5.1.2.2.8.23	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	14.854.000
5.1.2.2.8.27	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	215.000.000

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.2.2.8.28	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	38.600.000
5.1.2.2.8.32	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	290.000.000
5.1.2.2.8.33	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	104.000.000
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	19.020.079.200
5.1.2.2.9.1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	300.000.000
5.1.2.2.9.2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	668.600.000
5.1.2.2.9.3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	5.305.127.200
5.1.2.2.9.4	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	35.000.000
5.1.2.2.9.5	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi	677.000.000
5.1.2.2.9.6	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	2.020.000.000
5.1.2.2.9.7	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	60.000.000
5.1.2.2.9.8	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	135.000.000
5.1.2.2.9.11	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.509.974.000
5.1.2.2.9.12	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	688.000.000
5.1.2.2.9.13	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	2.125.999.000
5.1.2.2.9.14	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	5.242.880.000
5.1.2.2.9.16	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata	2.499.000
5.1.2.2.9.17	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata	75.000.000
5.1.2.2.9.19	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataaan	75.000.000
5.1.2.2.9.20	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataaan	100.000.000
5.1.2.2.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	15.700.000
5.1.2.2.10.1	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi	2.500.000
5.1.2.2.10.4	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Air Minum	2.500.000
5.1.2.2.10.14	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian	8.900.000
5.1.2.2.10.17	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	1.800.000
5.1.2.2.11	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	2.189.000.000
5.1.2.2.11.2	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	1.939.000.000
5.1.2.2.11.3	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	250.000.000
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	21.092.613.950
5.1.2.2.12.1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	18.748.808.450
5.1.2.2.12.2	Belanja Sosialisasi	981.824.900
5.1.2.2.12.3	Belanja Bimbingan Teknis	1.361.980.600
5.1.2.2.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	24.718.000.000
5.1.2.2.13.1	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	24.648.000.000
5.1.2.2.13.11	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	70.000.000
5.1.2.2.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	1.919.816.000
5.1.2.2.14.1	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	-
5.1.2.2.14.14	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	98.900.000
5.1.2.2.14.18	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	1.820.916.000
5.1.2.2.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	123.821.000
5.1.2.2.15.2	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	5.380.000
5.1.2.2.15.5	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	118.441.000
5.1.2.2.17	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah	10.000.000
5.1.2.2.17.145	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	10.000.000
5.1.2.2.18	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah	3.690.000
5.1.2.2.18.7	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.690.000
5.1.2.2.19	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	9.227.960.000
5.1.2.2.19.1	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	9.227.960.000
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	290.832.127.800
5.1.2.3.1	Belanja Pemeliharaan Tanah	1.636.405.000